

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dalam kehidupan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang mana hal ini dapat terwujud melalui proses pendidikan. Lingkungan yang tidak bersih seperti pemukiman yang kumuh, selokan yang tidak dirawat kebersihannya merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan kesehatan serta kematian.<sup>1</sup>

Dalam ekonomi mikro, kesehatan manusia juga merupakan salah satu modal dasar berproduktivitas. Dengan tubuh yang sehat akan membuat hidup jauh lebih produktif, bekerja juga akan lebih mudah dan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Sementara itu, ekonomi makro memandang, penduduk yang sehat merupakan factor dalam mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai pembangunan nasional jangka panjang.<sup>2</sup> Didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Bab IV pasal 14 ayat (1) dan (2) juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar mulai dari perencanaan sampai penyelenggaraannya untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang terjangkau masyarakat dan merata. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut

---

<sup>1</sup> sumber.belajar.kemdikbud.go.id. 2019. *Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk*. Diakses pada 9 Agustus 2022 pukul 20.41 WIB melalui ([https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Jumlah\\_Penduduk\\_-\\_dwi/Pertumbuhan-Penduduk.html](https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Jumlah_Penduduk_-_dwi/Pertumbuhan-Penduduk.html))

<sup>2</sup> Ibid.

diperlukan adanya kerjasama, komitmen serta kontribusi dari semua pihak mau itu masyarakat ataupun swasta.

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM telah menjelaskan dan menggambarkan proses warga negara dalam mencapai hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Indeks ini dilakukan untuk mengukur dan melihat tingkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Terdapat 3 (tiga) aspek dasar dalam IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH), pengetahuan dari Harapan Lama Sekolah/Rata-rata Lama Sekolah (HLS/RLS) dan standar hidup dilihat dari pendapatan per kapita.<sup>3</sup> Pada Tahun 2021, IPM Indonesia telah mencapai 72,29% atau mengalami peningkatan sebesar 0,35% poin atau 0,49% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 71,94%.

Mengingat hal ini, nilai prevalensi (jumlah total kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah) dari permasalahan gizi suatu negara cenderung akan menurun ketika angka IPM meningkat. Sehingga prevalensi balita pendek dan kurus secara signifikan ditemukan pada daerah dengan nilai IPM yang rendah, terlihat dalam sebuah studi ekologi yang dilakukan di 144 negara di dunia dengan menghubungkan prevalensi balita pendek dan kurus menggunakan kategori nilai IPM.<sup>4</sup> Maka sebagai negara berkembang, masalah malnutrisi terutama pada

---

<sup>3</sup> Widari Sri, "Analisis Prevalensi Stunting Di Indonesia Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) 2030" (Andalas University, 2021), <http://scholar.unand.ac.id/94944/>.

<sup>4</sup> Handayani Nur Utami and Rofingatul Mubasyiroh, "Masalah Gizi Balita Dan Hubungannya Dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Nutritional Problems Among Underfive Children and It'S Relationship With Public Health Development Index)," *Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan* 42, no. 1 (2019): 10.

anak masih dihadapi di Negara Indonesia. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekurangan gizi anak di Indonesia.

*Stunting* pada balita menjadi salah satu masalah gizi global, sebanyak 149,2 juta (22%) balita di Dunia yang mengalami *stunting* menurut *World Health Organization* (WHO).<sup>5</sup> Tahun 2020 Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) telah melaporkan bahwa prevalensi *stunting* pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) mencapai 31,8% yang menjadikan Indonesia berada pada peringkat kedua di Asia Tenggara.<sup>6</sup> Dikarenakan permasalahan tersebut, pemenuhan gizi anak telah menjadi prioritas kunci di Indonesia dan merupakan bagian dari komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menekankan permasalahan gizi seperti rendahnya berat badan saat lahir, *underweight* dan *stunting*.

*Stunting* adalah adanya kekurangan gizi kronis yang menyebabkan kondisi gagal tumbuh pada balita (bayi di bawah 5 tahun) sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi ini terjadi semenjak bayi di dalam kandungan dan masa awal kelahiran, setelah bayi berusia 2 tahun kondisi *stunting* baru dapat terlihat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* pasal 1 menjelaskan, *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di

---

<sup>5</sup> Who.int. 2020. *Joint Child Malnutrition Estimates*. Diakses pada 13 Oktober 2022 Pukul 20.12 WIB melalui (<https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicf-who-wb>)

<sup>6</sup> databoks.katadata.co.id. 2021. *Prevelensi Stunting Balita Indonesia Tertinggi ke-2 di Asia Tenggara*. Diakses pada 13 Oktober 2022 Pukul 11.10 WIB melalui (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/prevalensi-stunting-balita-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara> ).

bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.<sup>7</sup> Jika dilihat dari perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam jangka pendek hingga jangka panjang, beban gizi ganda memberikan dampak buruk bagi kesehatan maupun produktivitas ekonomi sehingga masuk ke dalam *Double Burden of Malnutrition* (DBM).<sup>8</sup>

Ciri-ciri dari anak yang tergolong kedalam kelompok *stunting* memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak seumuran dengannya. Akan tetapi bukan berarti semua anak yang memiliki tubuh lebih pendek tersebut termasuk kedalam kelompok *stunting*. Hal ini dikarenakan tinggi badan tidak menjadi satu-satunya tolak ukur dalam menilai *stunting*, melainkan terdapat hal lain yang harus diperhatikan, yaitu dengan memantau perkembangan anak melalui berat badan dan juga lingkar kepalanya. Dalam hal ini yang menjadi penyebab utama terjadinya *stunting* diantaranya: tidak bernutrisinya asupan makanan, terdapat penyakit infeksi, serta buruknya pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan.<sup>9</sup>

Bila penyebab-penyebab tersebut terjadi, kemungkinan besar akibatnya adalah munculnya masalah gizi yang terjadi terus menerus. Sehingga dalam jangka pendek dapat menghambat pertumbuhan fisik, kecerdasan, perkembangan otak dan metabolisme tubuh yang terganggu. Sementara itu, dalam jangka panjang dapat mengganggu kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kekebalan tubuh menurun

---

<sup>7</sup> Indonesian Government, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting," *Indonesian Government* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021).

<sup>8</sup> cegahstunting.com. (2022). *Double Burden of Malnutrition*. Diakses pada 13 Oktober 2022. <https://www.cegahstunting.com/post/double-burden-of-malnutrition>

<sup>9</sup> Anggun Hari Kusumawati et al., "Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Duren, Kecamatan Klari." *Jurnal Buana Pengabdian* Vol. 3 No. 1. (2021) : 122.

dan tingginya resiko terjangkau diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah, kegemukan, stroke, kanker, dan disabilitas di usia tua, serta tidak berdaya saingnya kualitas kerja sehingga mengakibatkan menurunkan produktifitas ekonomi.<sup>10</sup>

Dampak *stunting* akan mengakibatkan perubahan kualitas generasi bangsa secara tidak langsung. Dimana dampak *stunting* terhadap pembangunan ekonomi, yaitu dapat menimbulkan pengangguran secara besar-besaran, rendahnya kualitas kesadaran lingkungan yang baik sehingga akan mengakibatkan degradasi kerusakan lingkungan, dan banyaknya tenaga kerja asing yang akan mendominasi bila penduduk tidak memiliki *skill* yang baik. Sehingga dengan adanya permasalahan ini perekonomian negara akan mengalami kerugian sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>11</sup>

Menurut Dorsey, untuk mencegah terjadinya *stunting* pada anak diperlukan adanya upaya promosi kesehatan masyarakat.<sup>12</sup> Kegiatan promosi kesehatan ini bertujuan untuk menginformasikan terkait hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan baik kesehatan individu maupun masyarakat, melakukan pengembangan sumber daya kesehatan dan melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Maka dari itu, melakukan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu langkah yang tepat. Maksud pemberdayaan pada penelitian ini ialah

---

<sup>10</sup> furry Agustina And Yuliasti Eka Purnaman Arum, Dyah Noviwati Setya Purnaman, “Hubungan Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24 – 59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon Progo,” *Antimicrobial Agents And Chemotherapy*, 2014.

<sup>11</sup> P2ptm.kemkes.go.id. 2018. Multi Sektor untuk Menurunkan *Stunting* dan Eliminasi TB. Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 22.12 WIB melalui (<https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/kerjasama-multi-sektor-untuk-menurunkan-stunting-dan-eliminasi-tb>)

<sup>12</sup> Dyah Dwi Astuti, Rita Benya Adriani, And Tri Widyastuti Handayani, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Stop Generasi Stunting,” *Jurnal Masyarakat Mandiri* 4, No. 2 (2020): 156–162.

untuk mewujudkan peningkatan mutu hidup atau kesejahteraan individu pada seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi segala permasalahan yang dihadapi, yaitu perbaikan dari segi kesehatan sosial yang dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan atau ilmu serta keterampilan untuk menambah wawasan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi isu kesehatan di masyarakat. Dalam menghadapi dan mengatasi suatu masalah dibutuhkan adanya proses penanggulangan.<sup>13</sup> Sehingga proses menghadapi dan mengatasi tingginya angka *stunting* di Indonesia merupakan bentuk penanggulangan dipenelitian ini.

Bila dilihat dari bidang kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat.<sup>14</sup> Hal ini perlu untuk diperhatikan karena *stunting* merupakan hal yang sensitif untuk masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak menerima bila anaknya memiliki ciri-ciri dari *stunting* tersebut. Ini menjadi salah satu bukti belum pedulinya masyarakat mengenai bahayanya *stunting*. Sehingga memang perlu adanya penumbuhan

---

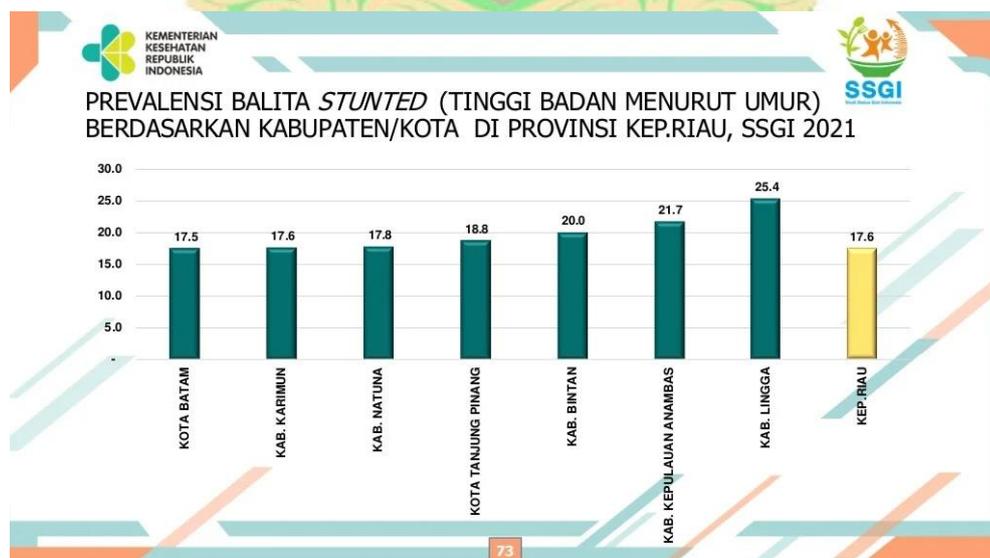
<sup>13</sup> Febi Rama Silpia, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Stunting (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) Didesa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan" (Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, 2019).

<sup>14</sup> Indonesian Government, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan", *Indonesian Government* (Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

kesadaran kepada masyarakat serta perlindungan dari pihak pemerintah dan juga tenaga kesehatan yang lebih paham mengenai *stunting*.

Salah satu usaha pemerintah dalam menurunkan angka *stunting* melalui adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang mana ini merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, sehingga seluruh Indonesia wajib melaksanakannya termasuk Kepulauan Riau. Setiap tahun Kepulauan Riau telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya *stunting*, sehingga Kepulauan Riau menduduki posisi pertama untuk cakupan Sumatera yang mana proporsi angka *stunting* Kepulauan Riau berada di 17,6% menurut Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021. Sehingga bila dilihat data berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dijelaskan melalui gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1. 1**  
**Prevalensi Balita *Stunted* (TB/U) berdasarkan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, SSGI 2021**



Sumber: SSGI Kemenkes RI, 2021

Dari gambar 1.1 dapat terlihat bahwa Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten (Kepulauan Anambas, Bintan, Karimun, Lingga dan Natuna) dan 2 Kota (Tanjungpinang dan Batam). Sehingga angka *stunting* Kepulauan Riau Tahun 2021 pada gambar 1.1, terlihat bahwa prevalensi balita *stunting* di Kepulauan Riau sebesar 17,6%, yang mana Kota Batam merupakan daerah dengan prevalensi *stunting* terkecil, yaitu sebesar 17,5% sedangkan daerah dengan prevalensi *stunting* terbesar diduduki oleh Kabupaten Lingga dengan angka 25,4%. Dapat dilihat pula bahwa ada 5 daerah yang proporsi angka *stunting*-nya tergolong kecil berdasarkan standar WHO 20% diantaranya Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam, sedangkan 2 daerah lainnya masih di atas 21%.

Provinsi Kepulauan Riau sendiri tersebar dalam 2.408 pulau dengan luas wilayahnya sebesar 251.810,71 km<sup>2</sup> yang mana sekitar 4% adalah daratan dan 96% lautan.<sup>15</sup> Dengan keadaan geografis seperti ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk dapat menjangkau seluruh masyarakatnya. Sehingga untuk itu perlu adanya kerja sama dari setiap pemerintah daerah setempat untuk dapat menyatukan tujuan, salah satunya dalam menangani angka *stunting*.

Jumlah balita di Kepulauan Riau pada Tahun 2021 sebanyak 191.988 anak yang mana diantaranya terdapat 98.376 anak laki-laki dan 93.612 merupakan anak perempuan. Dari jumlah tersebut, prevalensi *stunting* di Kota Batam merupakan yang paling rendah dari daerah Kepulauan Riau lainnya yaitu sebesar 6,02% yang mana jumlah balita yang termasuk kelompok *stunting* sebesar 3.356 anak dari total

---

<sup>15</sup> kepriprov.go.id. 2022. *Tentang Kepri Provil Singkat Provinsi Kepulauan Riau*. Diakses pada 8 September 2022 pukul 23.55 WIB melalui (<https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>)

55.720 balita di Kota Batam. Amsakar Achmad, Wakil Walikota Batam menyebutkan terdapat 1,2 juta jiwa jumlah penduduk di Kota Batam dan didominasi oleh usia produktif, dengan jumlah ini membuat pemerintah Kota Batam harus fokus dalam menangani penurunan *stunting*. Ketua BKKBN RI Hasto Wardoyo juga telah mengatakan bahwa Batam telah sangat baik dalam menangani dan mengurangi angka *stunting* hal ini terlihat dari angka *stunting* Kota Batam telah menurun dari 8,31% menjadi 6,02%.<sup>16</sup>

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pasal 11 ayat 3 mengatakan bahwa pemerintah desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, sehingga menjelaskan bahwa setiap pemerintah desa dapat merancang program sesuai dengan kondisi daerah masing-masing demi tercapainya tujuan. Dalam mengurangi angka *stunting* pemerintah memperhatikan dua intervensi, yaitu Intervensi Gizi Spesifik (Kesehatan) dan Intervensi Gizi Sensitif (Non- Kesehatan). Kepala Seksi Kesga (Kesehatan Keluarga) dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Batam mengatakan, bahwa:

“Dalam penanganan *stunting* ini, pemerintah memperhatikan dua intervensi gizi yang mana ada yang namanya Intervensi Gizi Spesifik (Kesehatan) dan Intervensi Gizi Sensitif (Non-Kesehatan).” (Wawancara dengan Kepala Seksi Kesga (Kesehatan Keluarga) dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Batam, pada 9 Mei 2022)

Dalam hal ini Intervensi Gizi Spesifik, merupakan suatu kegiatan yang secara langsung dapat mengatasi terjadinya *stunting*, sedangkan Intervensi Gizi Sensitif (Non-Kesehatan) merupakan faktor-faktor yang tidak secara langsung

---

<sup>16</sup> Beritasatu.com. 2021. 3.356 Balita Di Batam Alami *Stunting*. 2021. Diakses pada 18 April 2022 pukul 22.32 WIB melalui (<https://www.Beritasatu.Com/Kesehatan/844217/3356-Balita-Di-Batam-Alami-Stunting>)

mempengaruhi *stunting*. Hal ini juga telah dipaparkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kota Batam yang mana Intervensi Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan *Stunting* beserta sarannya meliputi:

a. Intervensi Gizi Spesifik

- 1) Intervensi diberikan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
- 2) Dilaksanakan oleh sektor kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku yang berupa perawatan dan pelayanan pengobatan
- 3) Sasaran intervensi gizi spesifik:
  - a) Ibu hamil;
  - b) Ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - c) Ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.
- 4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil antara lain:
  - a) Pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b) Pemberian suplementasi zat besi dan asam folat;
  - c) Pemberian suplementasi yodium;
  - d) Penanggulangan kecacingan pada ibu hamil; dan
  - e) Perlindungan ibu hamil dari penyakit malaria.
- 5) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan, antara lain:

- a) Pemberian ASI jolong/*coloctrum* melalui inisiasi menyusui dini (IMD); dan
  - b) Pemberian ASI eksklusif.
- 6) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, antara lain:
- a) Mendorong penerusan pemberian ASI sampai dengan umur 23 (dua puluh tiga) bulan;
  - b) Pendampingan tentang pemberian makanan pendamping ASI;
  - c) Penyediaan obat cacing;
  - d) Penyediaan suplementasi zink;
  - e) Pemberian zat besi (tablet tambah darah);
  - f) Perlindungan terhadap malaria;
  - g) Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL); dan
  - h) Pencegahan dan pengobatan diare.

b. Intervensi Gizi Sensitif

- 1) Intervensi gizi pada masyarakat termasuk ibu hamil dan anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
- 2) Kegiatan intervensi gizi sensitif, antara lain:
  - a) Menyediakan dan memastikan akses air bersih;
  - b) Menyediakan dan memastikan akses sanitasi;
  - c) Melakukan penambahan zat gizi pada bahan pangan;
  - d) Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan KB;
  - e) Menyediakan JKN;

- f) Menyediakan Jaminan persalinan (Jampersal);
- g) Memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada orang tua;
- h) Memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- i) Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j) Memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi kepada remaja;
- k) Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l) Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.

Pelaksanaan dua intervensi ini diwujudkan melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi. Aksi Pertama, Analisis Situasi dimana Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) dan juga tim menginput data analisis dari rebus *stunting*, menginput data gizi yang diinput melalui aplikasi Bangda. Aksi kedua, Rencana Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penurunan *stunting* melalui konvergensi *stunting* sehingga pemerintah kota menyusun perencanaan kegiatan terhadap 6 OPD penopang dan pihak pendukung lainnya yang mana kegiatan-kegiatannya, yaitu:

1. Dinas Kesehatan, melakukan peningkatan dalam hal kesehatan atau menjalankan Intervensi Gizi Sensitif seperti pemberian nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan dan membagikan zat besi untuk remaja. Kegiatan kesehatan yang dilakukan bukan hanya berfokus pada balita, tetapi ibu hamil, remaja dan juga lansia. Dalam melakukan segala kegiatan Intervensi Gizi Sensitif Dinas Kesehatan dibantu dengan tenaga kesehatan lainnya termasuk puskesmas.

2. Dinas Pendidikan, mengadakan program PAUD dan juga melakukan kegiatan *parenting* kepada para orang tua agar pengetahuan orang tua meningkat sehingga anak-anaknya dapat terhindar dari adanya resiko *stunting*.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, melakukan pendampingan keluarga dan Bina Keluarga Balita dengan memberikan edukasi kepada pasangan muda mengenai pentingnya meminum Tablet Tambah Darah (TTD) dan KB.
4. Dinas Cipta Karya Tata Ruang, mengelola sanitasi dan juga air bersih sehingga masyarakat terhindar dari penyakit-penyakit dan juga bakteri lainnya yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan anak. Hal yang dilakukan seperti membuat tadah hujan dengan membuat waduk kemudian menyaring dan memompa air bersih tersebut ke rumah-rumah masyarakat. Dinas Cipta Karya Tata Ruang juga membuat “Jamban Bersih” sehingga lingkungan masyarakat lebih bersih, hal ini dilakukan karena sebelum dibuatnya “Jamban Bersih” ini masyarakat banyak yang membuang kotorannya ke laut.
5. Dinas Ketahanan Pangan, memberikan edukasi mengenai keanekaragaman pangan. Hal ini dilakukan karena banyak masyarakat yang kurang memaksimalkan ketahanan pangan yang ada, padahal banyak sekali tumbuhan-tumbuhan disekitar masyarakat yang sangat bergizi untuk dimakan.
6. Dinas Sosial, melakukan peningkatan pengetahuan kepada kader-kader posyandu, melalui Dinas Sosial ini juga insentif para kader posyandu di salurkan.

7. Kementrian Agama, pemberian edukasi kepada pasangan muda yang mana kegiatan ini dilakukan di KUA, sehingga kerjasama KUA sangat memiliki peran yang kuat untuk mengatasi adanya resiko *stunting* pada balita. Ini juga merupakan peran penting karena KUA merupakan awal mula dari terjadinya pernikahan. Sehingga KUA memiliki peran untuk mengedukasi calon pengantin.
8. Perguruan Tinggi, melakukan Kegiatan Kerja Nyata (KKN) di lokus *stunting* yang ada di Kota Batam. Dimana Perguruan Tinggi bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan waktu dan juga tenaganya untuk mengabdikan dengan pemberian edukasi mengenai pencegahan *stunting* kepada masyarakat. Pengabdian ini harus di laporkan kepada penanggung jawab dari pihak Perguruan Tinggi dan juga pemerintah.

Aksi ketiga, Rembuk *Stunting* yang merupakan suatu pertemuan untuk membicarakan hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah serta menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menangani *stunting*, didalam aksi ini juga rencana kegiatan yang sebelumnya dibuat dapat dipaparkan kepada seluruh pihak yang bersangkutan. Aksi keempat, Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa yang mana dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam mendukung upaya pencegahan serta penurunan *stunting* sehingga segala kegiatan dapat tersusun dengan jelas dan difungsikan sebagai acuan untuk perencanaan dan pelaksanaan. Aksi kelima, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia yang bertujuan untuk memastikan mobilisasi Kader Pembangunan Manusia berjalan dengan baik serta kinerjanya dapat terlaksana dengan baik sesuai tugas dan perannya. Aksi keenam, terbentuknya Sistem Manajemen Data yang berguna sebagai penyedia data untuk

pengelolaan program pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi. Aksi ketujuh, Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting* merupakan langkah pemerintah kabupaten/kota dalam mengumpulkan data prevalensi terkini, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai landasan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Aksi kedelapan, Review Kinerja Tahunan merupakan penilaian kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota.

Kota Batam sendiri telah melaksanakan 8 aksi konvergensi penurunan *stunting* sebagai proses atau langkah dalam melakukan upaya pencegahan dan penurunan *stunting*. Kota Batam juga mendapatkan apresiasi berupa peringkat pertama daerah dengan kinerja terbaik yang mana apresiasi ini diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Wali Kota Batam, yaitu Muhammad Rudi dan disampaikan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2611/Banda perihal hasil penilaian kinerja 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* di Kepulauan Riau.

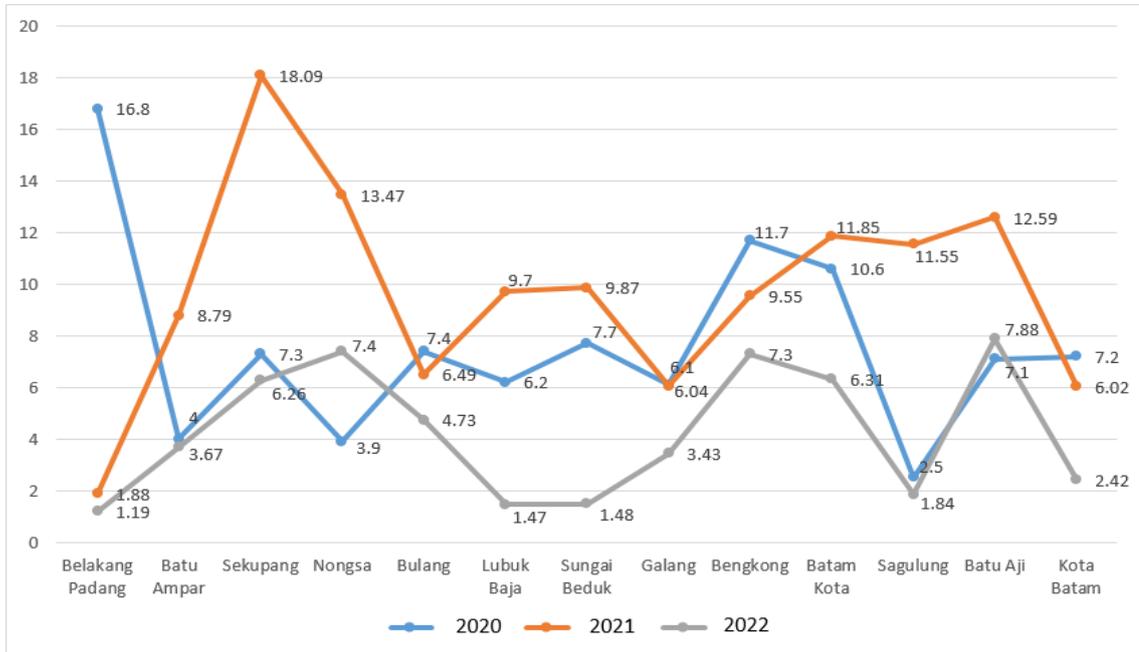
Dengan terlaksananya 8 aksi konvergensi penurunan *stunting* ini dapat memudahkan Tim Koordinasi Penanggulangan Anak Kerdil (*Stunting*) Kota Batam dalam merancang programnya dengan baik, dimana didalam aksi ketiga, yaitu Rembuk *Stunting* yang dipimpin oleh Wali Kota Batam serta turut hadir Ketua DPRD Kota Batam, Bapelitbang Daerah, Kementerian Agama, Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Kepala BPS, 6 Organisasi Pemerintah Daerah terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Cipta Karya, Tim Puskesmas, Camat, Lurah,

Tim Penggerak PKK. Melalui Rembuk *Stunting* ini pihak-pihak yang terlibat melakukan evaluasi serta diskusi untuk menentukan aksi yang akan dilakukan kedepannya. Sehingga setiap pihak memberikan data, melaporan semua hasil pekerjaannya dan mendiskusikan hasil yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian daerah Kecamatan Belakang Padang, Puskesmas Belakang Padang melakukan pelaporan dan mengajukan program yang akan mereka jalankan kedepannya, yaitu Program Jaga Gizi Anak Pulau. Dari aksi Rembuk *Stunting* inilah program ini diputuskan untuk dapat dilaksanakan.

Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas pelaksanaan, kapasitas sumberdaya manusia, kualitas pemantauan, evaluasi serta pelaporan. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui serta memahami kondisi spesifik daerahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pada setiap kecamatan bisa saja berbeda, masing-masing memiliki strategi dan caranya sendiri. Maka dari itu hasil yang dikeluarkan juga berbeda, ada yang berhasil dalam menurunkan angka *stunting* dan adapula yang tidak. Sehingga dapat terlihat melalui data Proporsi *Stunting* (TB/U) Pada Balita Menurut Kecamatan di Kota Batam, sebagai berikut:

Gambar 1. 2

Proporsi *Stunting* (TB/U) Pada Balita Menurut Kecamatan di Kota Batam 2020-2022



Sumber: Olahan peneliti, 2023

Berdasarkan gambar 1.2, terdapat hal menarik yang ada pada data Proporsi *Stunting* pada balita di Kecamatan Belakang Padang. Terlihat bahwa pada Tahun 2020, Kecamatan Belakang Padang memiliki angka *stunting* yang tinggi sebesar 16,8% bila dibandingkan dengan 11 Kecamatan lainnya, namun hal ini berbalik pada Tahun 2021 yang mana menjadi Kecamatan dengan angka *stunting* yang paling rendah yaitu sebesar 1,88% dari 11 Kecamatan lainnya dan terus menurun pada Tahun 2022 dengan angka 1,19%. Bisa terlihat bahwa Kecamatan Belakang Padang mengalami penurunan dengan sangat tajam. Bila dilihat pula pada data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Belakang Padang menjadi kecamatan dengan angka proporsi *stunting* tersendah selama 2 tahun berturut-turut yaitu Tahun 2021 dan 2022. Tentu untuk mendapatkan persentase dari penurunan yang terjadi di Kecamatan Belakang Padang pada Tahun 2020 dan 2021 data pada gambar 1.2,

haruslah mengetahui jumlah sasaran balita dan juga jumlah kasus *stunting* yang ada di daerah Belakang Padang, sehingga akan dipaparkan pada tabel perbandingan 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kasus *Stunting* di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2020-2021**

No	Desa/Kelurahan	2020				2021			
		Sasaran Balita		TB/U		Sasaran Balita		TB/U	
		L	P	SP	P	L	P	SP	P
1	Pulau Terong	98	71	0	0	114	87	1	3
2	Pecong	35	37	2	4	49	42	0	0
3	Kasu	124	91	6	17	153	111	0	4
4	Pemping	26	27	2	1	29	25	0	1
5	Tanjung Sari	133	101	2	2	134	108	1	3
6	Sekanak Raya	152	169	4	5	171	165	0	9
<b>JUMLAH</b>		<b>1.064</b>		<b>45</b>		<b>1.188</b>		<b>22</b>	
<b>Keterangan:</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolom Hijau</li> <li>L : Laki-laki</li> <li>P : Perempuan</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolom Kuning</li> <li>SP : Sangat Pendek</li> <li>P : Pendek</li> </ul>				

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Tabel 1.1 merupakan penjelasan dari data pada gambar 1.2 yang mana tabel 1.1 ini memaparkan perbandingan jumlah kasus pada balita *stunting* di Kecamatan Belakang Padang pada Tahun 2020 dan 2021. Pada tabel 1.1 kolom berwarna hijau merupakan data sasaran balita di Tahun 2020 dan 2021, sedangkan kolom berwarna kuning merupakan data dari kasus *stunting* (TB/U) di Tahun 2020 dan 2021. Pada data Tahun 2020 terlihat bahwa jumlah sasaran balita sebanyak 1.064 balita dengan kasus *stunting* TB/U sebesar 45 balita, sedangkan pada data Tahun 2021 jumlah

sasaran balita sebanyak 1.188 balita dengan kasus *stunting* TB/U sebesar 22 balita. Bila kita lihat pada jumlah sasaran balita, terlihat bahwa jumlah balita di Tahun 2021 lebih besar dari pada Tahun 2020. Walaupun jumlah balita pada Tahun 2021 lebih besar, tetapi jumlah kasus *stunting* di Tahun 2021 lebih sedikit dari pada Tahun 2020. Bahkan pada Tahun 2021, Kelurahan pecong dijadikan contoh daerah bebas *stunting* atau nol angka *stunting*. Hal ini merupakan bukti adanya penurunan yang sangat drastis pada gambar 1.2 mengenai proporsi *stunting* pada balita.

Ternyata data yang terjadi pada Tahun 2020 di Kecamatan Belakang Padang dengan Prevalensi sebesar 16.8% tersebut terjadi karena salah satu faktornya yaitu adanya salah pengukuran yang terjadi. Dengan adanya keterbatasan dana yang terjadi disaat pandemi Covid-19, membuat dana difokuskan untuk penanganan Covid. Hal ini terjadi karena alat pengukuran yang kurang memadai dan terbatasnya jumlah, masih kurang terberdayanya pengetahuan pada kader, dan juga masih belum terbukannya para kader dengan tenaga ahli dari puskesmas. Ini semua merupakan kendala yang sangat besar dampaknya. Namun pada Tahun 2021, semuanya sudah mulai diatasi sehingga pengetahuan kader sudah meningkat, hubungan para kader dan masyarakat dengan tenaga ahli sudah terbuka sehingga segala kendala yang terjadi dapat langsung diatasi bersama.

Penurunan drastis di Kecamatan Belakang Padang terjadi karena sudah mulai teratasinya permasalahan pada Tahun 2021 seperti pengetahuan kader sudah meningkat, hubungan para kader dan masyarakat dengan tenaga ahli sudah terbuka, dan banyaknya masyarakat yang sadar serta paham mengenai bahayanya *Stunting* untuk masa depan anak mereka masing-masing. Sehingga masyarakat sudah mulai terbuka dengan pihak kesehatan dan rajin untuk mengontrol anak ke puskesmas.

Masyarakat juga sudah mulai aktif untuk mengikuti segala kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan kualitas pertumbuhan anak mulai dari remaja sampai ibu yang memiliki anak balita. Sehingga yang awalnya masyarakat sangat tertutup akan pengetahuan yang diberikan oleh pihak-pihak pemerintah terkhusus puskesmas, sekarang sudah banyak kemajuan yang terlihat dari masyarakat seperti masyarakat sudah mulai terbuka pikirannya dan mereka sudah mulai aktif untuk bertanya mengenai kondisi anaknya masing-masing. Sehingga segala kendala yang terjadi dapat langsung diatasi bersama.

Hal ini terjadi juga karena puskesmas dan para kader masyarakat tidak hanya menjalankan programnya begitu saja, namun dibarengi dengan melakukan pendekatan yang mana masyarakat diibaratkan sebagai keluarga mereka sendiri dan begitu juga sebaliknya. Sehingga puskesmas dan juga para kader ingin menumbuhkan rasa kekeluargaan ini dengan melakukan pendekatan sedikit demi sedikit yang tentunya dibantu atau dijematani oleh para kader kelurahan yang lebih paham akan watak dari setiap masyarakat di kelurahannya.

Program yang dijalankan Kecamatan Belakang Padang melalui Puskesmas Belakang Padang bernama Jaga Gizi Anak Pulau. Program ini merupakan bentuk atau hasil dari terlaksananya Rembuk *Stunting*. Dalam kegiatan Rembuk *Stunting*, Kecamatan Belakang Padang melalui Puskesmas Belakang Padang melaporkan data sasaran balita dan angka kasus *stunting* pada balita dan memberikan perbandingan data dari tahun sebelumnya. Selanjutnya Puskesmas memaparkan kendala atau masalah yang terjadi selama pelaksanaan pada tahun sebelumnya beserta solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya puskesmas memaparkan program yang mereka rencanakan kepada seluruh *stakeholder* dan pertanyaan serta saran

dapat disampaikan untuk mematangkan program ini. Sehingga dari hasil diskusi, masukan, serta saran yang ada dalam kegiatan Rembuk *Stunting* ini diputuskanlah program Jaga Gizi Anak Pulau sebagai suatu langkah untuk mengurangi angka *stunting* di Kecamatan Belakang Padang. Sumber dana dari program ini sendiri berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Jaga Gizi Anak Pulau adalah suatu program yang berfokus memberikan pengetahuan tentang pola asuh, gizi, dan pengolahan pangan yang merupakan bentuk adanya *stunting*. Tujuan program jaga gizi anak pulau ini adalah untuk membantu mengenali permasalahan kesehatan gizi yang dihadapi, membantu mengatasi masalah gizi dan mengarahkan untuk memilih cara yang paling sesuai. Sasaran dari Jaga Gizi Anak Pulau adalah Wanita Usia Subur (WUS) atau Remaja, ibu hamil dan ibu yang memiliki balita. Program Jaga Gizi Anak Pulau di dalamnya mencakup intervensi gizi spesifik, diantaranya :

- a. Memberikan *Smart Indication*, yaitu kegiatan ini dilakukan untuk membuka pemikiran masyarakat atau memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang apa itu *stunting*, ciri-ciri, dan juga dampak yang akan terjadi bila anak tergolong *stunting*. Dengan adanya pemberian edukasi ini diharapkan masyarakat dapat bertambah ilmunya sehingga ilmu tersebut dapat membawa perubahan awal untuk masyarakat. Sasaran dalam kegiatan ini yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Belakang Padang.
- b. *Smart Parenting*, merupakan suatu kegiatan pemberian edukasi untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian kepada orang tua untuk dapat mengasuh keturunannya dengan sehat, kegiatan yang dilakukan seperti

memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada orang tua terkhusus ibu balita dalam memberikan pendidikan mengenai anak usia dini, pemberian edukasi mengenai pentingnya ASI untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, Makanan Pendukung ASI (MP-ASI) untuk kebutuhan kembang bayi, pentingnya imunisasi, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya.

- c. *Smart Nutrition*, merupakan suatu kegiatan dengan memberikan edukasi dan meningkatkan kemampuan serta keahlian masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan apa yang dikonsumsi untuk tumbuh kembang masyarakat sehingga dapat meningkatkan kecerdasan otak anak, pertumbuhan anak, kesuburan anak, lalu dengan memberikan keterampilan mengenai pentingnya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga, hal ini bukan hanya untuk balita saja namun juga untuk ibu dan wanita usia subur atau remaja.
- d. *Smart Cooking*, ini merupakan kegiatan yang mana masyarakat diberi edukasi dan juga keterampilan dalam mengonsumsi makanan sehat, seperti dengan mengaplikasikan “Piring Makanku” dalam keseharian mereka. Piring Makanku ini merupakan contoh sajian makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan tubuh yang mana dalam satu porsi sajian dianjurkan separuh bagian piring diisi dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagian lainnya dapat diisi dengan karbohidrat dan protein, lalu dalam kegiatan ini masyarakat juga diberi pengetahuan mengenai makanan bergizi dengan mengolah bahan pangan lokal yang disebut dengan demo masak. Dimana masyarakat diajak memasak makanan sehat, hal ini dilakukan agar

ilmu atau edukasi yang diberikan dapat masyarakat aplikasikan dan praktekkan dalam kehidupannya, target kegiatan ini adalah ibu yang memiliki anak balita.

- e. Konsultasi gizi, dalam kegiatan ini masyarakat dapat melakukan konsultasi langsung ke posyandu atau ke puskesmas untuk melakukan konsultasi atau pengontrolan gizi pada anak. Pada kegiatan ini juga pihak puskesmas dan para kader juga bekerja sama untuk dapat melakukan pengecekan dengan sistem *door to door*, sehingga masyarakat terbuka wawasannya, dekat dengan pihak kesehatan dan tidak takut melakukan pengecekan rutin, Puskesmas dan Kader Posyandu juga melakukan pendampingan kepada wanita usia subur dan remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia nol sampai 59 bulan, hal ini dilakukan sebagai tahapan untuk mendewasakan sikap masyarakat sehingga dapat mandiri dan bertanggung jawab dengan kehidupannya dan keluarga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini bertujuan untuk melakukan pencegahan *stunting* melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, serta kreativitas masyarakat melalui pengolahan bahan pangan bergizi berbasis sumber daya lokal.

Dikarenakan keadaan geografis Kecamatan Belakang Padang yang memiliki banyak pulau didalamnya, membuat masyarakat harus menggunakan kendaraan laut untuk bisa sampai ke pusat Kecamatan Belakang Padang dan tentunya hal ini menimbulkan beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lengkap. Sesuai dengan yang disampaikan masyarakat sekitar di Belakang Padang yang mengatakan:

“Untuk pergi ke pulau-pulau cukup sulit karna tidak semua pulau yang akses kendaraan lautnya mudah, bahkan ada yang hanya memiliki satu kali perjalanan dalam sehari. Paling jauh itu kalau ke pulau geranting yang ada di kelurahan pulau terong, mungkin bisa 1 jam perjalanan tergantung cuaca dan keadaan ombak” (Wawancara dengan masyarakat sekitar di Belakang Padang Kota Batam, pada 24 Mei 2022)

Dengan kondisi seperti ini tentu pihak pemerintah, tenaga kesehatan dan tim lainnya memiliki kesulitan untuk menjangkau seluruh masyarakatnya. Sehingga memang dibutuhkan adanya kerjasama dari setiap daerah dan setiap pihak. Namun, dengan keadaan geografis Kecamatan Belakang Padang yang seperti ini, ternyata tidak membuat angka *stunting* semakin banyak jumlahnya melainkan menurun dan menjadi kecamatan dengan angka *stunting* terkecil di Kota Batam. Sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak Puskesmas Belakang Padang mengatakan:

“...memang untuk mengakses sampai ke seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Belakang Padang ini cukup sulit. Hal ini dikarenakan akses untuk kesana harus menyewa bot dan cukup memakan waktu yang lama. Namun, untuk mengatasi hal tersebut untungya kami memiliki tim-tim kader dari masyarakat yang sangat responsif untuk membantu dalam pengecekan dan pemantauan dalam hal kesehatan ke setiap keluarga dan tentu kegiatan ini tetap didampingi oleh pihak kesehatan di setiap pulau di daerah masing-masing.” (Wawancara dengan pihak Puskesmas Belakang Padang Kota Batam, pada 24 Mei 2022)

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa telah terjadi perubahan pola pikir dari beberapa masyarakat setempat terkait kesehatan termasuk *stunting*. Sehingga selama ini pihak puskesmas dalam melaksanakan pencegahan *stunting* dibantu oleh Kader PKK dan Posyandu yang mana kader ini ada sebagai bentuk dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Kader merupakan tenaga pendamping masyarakat dibidang kesehatan, dimana menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pasal 1 ayat 4

menyebutkan bahwa kader adalah orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.<sup>17</sup>

Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Batam, Amsakar Achmad yang merupakan Wakil Wali Kota Batam telah membentuk 1.632 orang kader pendamping keluarga. Dilakukan agar penanganan *stunting* ini dapat terlaksanakan diseluruh wilayah Kota Batam. Jumlah ini terbagi dalam 544 tim, setiap tim terdiri dari 3 orang diantaranya Kader PKK Kelurahan, Bidan serta Kader Posyandu. Jumlah kader yang berada di Kecamatan Belakang sendiri yaitu untuk Kader PKK berjumlah 182 orang kader, Kader Posyandu berjumlah 231 Orang dan Tim Pendamping Keluarga berjumlah 36 Orang.

Keberadaan kader sangatlah penting karena adanya kader kegiatan penurunan angka *Stunting* dapat terlaksana dengan baik yang mana kader memiliki beberapa peran, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Penggerak masyarakat untuk dapat ikut dalam upaya kesehatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Penggerak masyarakat agar dapat memanfaatkan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dan pelayanan kesehatan dasar;
- c. Pengelola UKBM;
- d. Penyuluh kesehatan kepada masyarakat;
- e. Pencatat kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; dan

---

<sup>17</sup> Indonesian Government, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan”, *Indonesian Government* (Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

<sup>18</sup> Ibid.

- f. Pelapor jika ada permasalahan atau kasus kesehatan setempat pada tenaga kesehatan.

Bukan hanya kader Tim Pendamping juga memiliki tugas atau peran dalam percepatan penurunan angka *Stunting* ini, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Melakukan Pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi adanya risiko *stunting* dan melakukan pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya dalam mencegah risiko *stunting*.
- b. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin agar mengetahui adanya risiko *stunting*, memberikan pengetahuan dan memfasilitasi calon pengantin (catin) dalam upaya penyembuhannya.
- c. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascasalin, memastikan ibu pascasalin sudah menggunakan KBPP MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas.
- d. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak di bawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko *stunting*, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi di atas 6 bulan mendapat MPASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi selama dasar lengkap sesuai jadwal.
- e. Memastikan keluarga mendapat bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan.

---

<sup>19</sup> Walikota Batam, *Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2021*, 2021.

Untuk mendampingi setiap keluarga dimulai dari calon pengantin (cantin). Sebelum melangsungkan pernikahan, setiap calon pengantin harus mendaftarkan aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil (Elsimil) yang dijalankan oleh BKKBN. Dilakukannya kegiatan ini karena salah satu faktor penyebab *stunting* adalah anak yang hamil di usia muda atau sebelum usia 20 tahun. Selanjutnya, Tim Pendamping Keluarga bisa mengarahkan calon pengantin untuk menjalani pemeriksaan medis kedua di faskes.

Karena pada dasarnya *stunting* juga bisa terdeteksi tanda-tandanya secara nyata. Misalnya, calon pengantin terkena anemia atau masalah dari sisi reproduksinya, selanjutnya akan ada rekomendasi untuk menunda kehamilan. Dalam hal ini, calon pengantin harus terus didampingi, sehingga dapat memaksimalkan pencegahan *stunting* di Kota Batam. Kota Batam tidak hanya berfokus dalam menangani balita yang sudah terkena *stunting* saja namun juga berfokus pada pencegahan. Hal ini dikarenakan terdapat faktor lain penyebab *stunting* yaitu tidak terpantaunya pertumbuhan dan perkembangan balita. Dalam penanganannya seluruh masyarakat yang berisiko *stunting* harus dibekali dengan data yang akurat. Tim-tim yang telah dibentuk merupakan sebuah langkah Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Batam, yang mana dalam hal ini tim-tim tersebut telah diberi pelatihan berupa pemberian edukasi mengenai pencegahan *stunting* terlebih dahulu. Dilakukan agar tim semakin paham akan tugas dan fungsinya sehingga dapat menyeragamkan pemahaman antar kelompok.

Pada penelitian ini proses yang dilakukan dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jaga Gizi Anak Pulau sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam

diukur menggunakan teori Ambar Teguh Sulistiyani yang mana didalamnya terdapat tiga tahapan, yaitu tahap penyadaran serta pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, tahap transformasi kemampuan yang berupa wawasan pengetahuan serta kecakapan-keterampilan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual serta kecakapan-keterampilan atau keahlian untuk mengantarkan pada kemandirian.<sup>20</sup>

Pada tahap penyadaran serta pembentukan sikap Puskesmas Belakang Padang selaku aktor pemberdaya melakukan peningkatan pengetahuan dengan memberikan edukasi mengenai apa itu *stunting*, penyebab serta dampak yang akan terjadi dari adanya *stunting* ini. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat lebih peka terhadap permasalahan *stunting* ini. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bidang Program Gizi Puskesmas Belakang Padang Kota Batam, sebagai berikut:

“Dalam proses penanganan *stunting* ini, hal yang paling awal dan cukup sulit adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya *stunting*. Maka dari itu kami Puskesmas Belakang Padang dibantu dengan Kader melakukan edukasi dan kunjungan rumah balita yang bermasalah gizi, sehingga memang kita sistemnya *door to door*.” (Wawancara dengan Bidang Program Gizi Puskesmas Belakang Padang Kota Batam, pada 24 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut Puskesmas Belakang Padang melakukan pemberian edukasi dan kunjungan langsung ke rumah balita yang memiliki masalah gizi, sehingga diharapkan pihak keluarga dapat lebih peduli dengan permasalahan yang ada. Pada tahap ini tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan adanya peran kader dalam pembentukan perilaku. Hal ini diperlukan karena

---

<sup>20</sup> Dra. Ambar Teguh Sulistiyani, M.si, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Madia: 2017), Hal 83

kaderlah yang lebih dekat dan memahami watak serta sosial budaya di lingkungannya sendiri.

### Gambar 1. 3

#### Kunjungan rumah balita yang memiliki masalah gizi



Sumber: Dokumentasi Puskesmas, 2021

Pada gambar 1.3 merupakan salah satu bentuk kegiatan penyadaran yang dilakukan oleh Puskesmas Belakang Padang kepada masyarakat yang memiliki permasalahan mengenai gizi. Kegiatan ini dilaksanakan langsung mendatangi rumah kelompok sasaran (*door to door*) sehingga seluruh kelompok sasaran dapat menerima edukasi yang diberikan serta merasakan manfaat dari kegiatan yang dilakukan.

Setelah masyarakat mendapatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pencegahan *stunting*, selanjutnya masyarakat akan memasuki tahap kedua yaitu tahap transformasi wawasan dan kemampuan. Puskesmas Belakang Padang bersama para kader melakukan pemberian keterampilan serta wawasan melalui pelatihan-pelatihan yang ada, seperti diadakannya kelas ibu hamil pada gambar berikut:

**Gambar 1. 4**  
**Kelas Ibu Hamil**



*Sumber: Dokumentasi Puskesmas, 2021*

Pada gambar 1.4 merupakan bentuk kegiatan dari tahap transformasi kemampuan yang berupa pemberian wawasan kepada ibu hamil mengenai pentingnya menjaga asupan gizi serta makan-makanan yang sehat, sehingga gizi anak di dalam kandungan ibu dapat terpenuhi. Hal ini dilakukan karena munculnya permasalahan gizi yang berawal dari bayi masih di dalam kandungan ibunya, maka dari itu kegiatan ini dilakukan juga untuk menambahkan wawasan para calon ibu, adanya kelas ini juga dapat membantu calon ibu dalam menjalani proses kehamilan dan untuk melancarkan persalinannya. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bidang Program Gizi Puskesmas Belakang Padang Kota Batam, sebagai berikut:

“Setelah tumbuh kesadaran dari masyarakat mengenai bahayanya *stunting*, selanjutnya kami memberikan pelatihan atau kelas untuk remaja, calon pengantin, ibu hamil dan juga ibu balita. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki wawasan serta keterampilan dalam melakukan pencegahan *stunting*.” (Wawancara dengan Bidang Program Gizi Puskesmas Belakang Padang Kota Batam, pada 24 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut Puskesmas Belakang Padang mengatakan bahwa, tahap ini penting untuk dilakukan sehingga terbukalah pengetahuan masyarakat dan penguasaan kecakapan-keterampilan yang dibutuhkan. Kegiatan dalam tahapan ini tidak hanya kelas ibu hamil saja, melainkan terdapat pemberian wawasan kepada remaja atau wanita usia subur, calon pengantin dan juga balita.

Tahap ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual serta kecakapan-keterampilan atau keahlian digunakan untuk mengantarkan masyarakat pada kemandirian, sehingga dalam lingkungan masyarakat dapat terlihat adanya inisiatif, kreasi serta inovasi. Terlihat dari adanya keinginan masyarakat untuk menjadi kader, yang mana ini merupakan wujud dari munculnya kesadaran beberapa masyarakat mengenai pentingnya *stunting*. Selain itu dapat terlihat pada gambar berikut:



**Gambar 1. 5**

**Jaga Gizi Anak Pulau**

*Sumber: Dokumentasi Puskesmas, 2021*

Pada gambar 1.5 adalah bentuk inovasi yang dilaksanakan para kader dalam keikutsertaan penanganan *stunting* melalui kerjasama dengan Dompot Dhuafa Kepulauan Riau untuk menjaga gizi anak pulau. Ini sesuai dengan yang dikatakan

oleh Ketua Forum Kader Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, sebagai berikut:

“Kader merupakan salah satu bentuk dari berhasilnya program penurunan angka *stunting* ini, karena kader hadir dari terbentuknya kesadaran mengenai bahayanya *stunting* bagi masa depan anak bangsa, sehingga inovasi yang kami lakukan selain dengan bekerjasama dengan pihak swasta atau Dompot Dhuafa tersebut kami juga memiliki inisiatif untuk membantu dalam penanganan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat serta menjadi sahabat untuk mereka.” (Wawancara dengan Ketua Forum Kader Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, pada 22 juni 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa kader merupakan bentuk dari telah berhasilnya program pemberdayaan sehingga dapat menunjukkan kedewasaan sikap sampai mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat pada penelitian ini merupakan suatu proses usaha dalam melakukan suatu perubahan kepada masyarakat di Kecamatan Belakang Padang guna untuk menekankan angka *stunting* melalui beberapa upaya seperti, penyadaran dan pembentukan sikap, tranformasi wawasan serta meningkatkan kemampuan pengetahuan, serta upaya untuk dapat sampai pada kemandirian dan kedewasaan sikap masyarakat.

Dalam penelitian Tahun 2019 yang dilakukan oleh Febi Rama Silpia mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan *Stunting* (Gangguan Pertumbuhan pada Anak), menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sangatlah penting dalam menanggulangi *stunting* karena merupakan permasalahan kesehatan yang sensitif dan akan berdampak buruk bagi masa depan anak dibidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Sehingga pemberdayaan sangat diperlukan untuk

mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan ini bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kasus *stunting* agar masyarakat dapat berdaya.<sup>21</sup>

Berdasarkan fenomena yang ada, fokus dari penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jaga Gizi Anak Pulau sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam yang dilaksanakan oleh Puskesmas Belakang Padang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jaga Gizi Anak Pulau sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Tahapan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jaga Gizi Anak Pulau sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Febi Rama Silpia, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan *Stunting* (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) Di Desa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan" (Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, 2019).

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Belakang Padang sebagai bentuk pencegahan *stunting*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengembangkan konsep keilmuan Administrasi Publik terutama pada pemberdayaan masyarakat dalam hal kesehatan serta kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan atau bahan evaluasi dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar lebih baik kedepannya.
- c. Bagi masyarakat serta pihak swasta, penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat terkait dengan *stunting* yang ada diseluruh wilayah Indonesia.